



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

PUSAT

DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DPRD MENGENAI
LKPJ TAHUN 2024
10 APRIL 2025



EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

CAPAIAN DAN TARGET KINERJA

MENGACU KEPADA BAB III.1 LKPJ

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebagai Kota yang Maju dan Inklusif Dalam Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93.93	97.76
	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	93.93	97.76
Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97.52	98.97
	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	90.35	96.55
Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	4
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4



CAPAIAN DAN TARGET KINERJA

MENGACU KEPADA BAB III.1 LKPJ

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	4	4
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	86	95.61
	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	86	97.51
	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	86	96.33
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Adm. dalam kondisi baik	83	83



REALISASI APBD TAHUN 2024

NO.	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	TOTAL ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	SETKO ADM. JAKARTA PUSAT 8 BAGIAN	302.815.090.774	282.934.750.263	93,43%
2	8 KECAMATAN	16.191.738.383	15.555.270.804	96,07%
3	44 KELURAHAN	460.971.071.464	447.877.794.521	97,16%
	TOTAL PAGU	779.977.900.621	746.367.815.588	95,69%



REALISASI APBD TAHUN 2024

NO.	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	TOTAL ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	8 Bagian Setko Adm. JP	302.815.090.774	282.934.750.263	93,43%
2	Kecamatan Tanah Abang	1.871.380.741	1.813.992.936	96,93%
3	Kelurahan Gelora	8.393.984.459	8.254.094.388	98,33%
4	Kelurahan Bendungan Hilir	13.920.509.472	13.600.988.635	97,70%
5	Kelurahan Karet Tengsin	9.501.934.891	9.422.065.487	99,16%
6	Kelurahan Petamburan	10.535.292.017	10.308.503.448	97,85%
7	Kelurahan Kebon Melati	11.262.805.060	10.971.576.635	97,41%
8	Kelurahan Kebon Kacang	10.745.846.383	10.357.350.267	96,38%
9	Kelurahan Kampung Bali	10.467.734.527	10.091.244.166	96,40%
10	Kecamatan Menteng	2.297.745.226	2.123.892.619	92,43%
11	Kelurahan Menteng	16.132.317.833	15.742.360.542	97,58%
12	Kelurahan Pegangsaan	10.936.006.614	10.511.499.734	96,12%
13	Kelurahan Cikini	7.709.222.802	7.436.761.597	96,47%
14	Kelurahan Gondangdia	8.297.445.803	8.002.442.546	96,44%
15	Kelurahan Kebon Sirih	8.963.370.026	8.792.398.647	98,09%



REALISASI APBD TAHUN 2024

NO.	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	TOTAL ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
16	Kecamatan Senen	2.299.546.755	2.200.360.483	95,69%
17	Kelurahan Kenari	8.757.440.528	8.497.332.499	97,03%
18	Kelurahan Paseban	9.722.135.880	9.454.635.565	97,25%
19	Kelurahan Kramat	9.817.654.700	9.395.829.970	95,70%
20	Kelurahan Kwitang	8.482.979.729	8.265.377.433	97,43%
21	Kelurahan Senen	8.813.263.334	8.657.090.181	98,23%
22	Kelurahan Bungur	10.009.959.667	9.541.566.280	95,32%
23	Kecamatan Cempaka Putih	2.013.643.667	1.962.290.416	97,45%
24	Kelurahan Rawasari	10.143.818.288	9.935.453.561	97,95%
25	Kelurahan Cempaka Putih Timur	13.100.613.916	12.646.941.749	96,54%
26	Kelurahan Cempaka Putih Barat	12.150.636.036	11.995.990.705	98,73%
27	Kecamatan Johar Baru	1.849.870.936	1.829.942.113	98,92%
28	Kelurahan Johar Baru	13.557.315.420	13.250.933.662	97,74%
29	Kelurahan Kampung Rawa	10.150.303.767	9.820.613.590	96,75%
30	Kelurahan Galur	9.618.543.740	9.512.877.478	98,90%
31	Kelurahan Tanah Tinggi	15.082.121.113	14.501.622.969	96,15%



REALISASI APBD TAHUN 2024

NO.	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	TOTAL ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
32	Kecamatan Kemayoran	1.842.163.468	1.803.191.936	97,88%
33	Kelurahan Harapan Mulia	10.162.612.166	9.700.743.162	95,46%
34	Kelurahan Cempaka Baru	10.817.514.250	10.332.083.648	95,51%
35	Kelurahan Sumur Batu	10.000.266.778	9.749.703.739	97,49%
36	Kelurahan Serdang	10.532.280.523	10.291.673.045	97,72%
37	Kelurahan Kebon Kosong	11.178.722.179	11.053.214.886	98,88%
38	Kelurahan Kemayoran	9.833.099.072	9.576.061.917	97,39%
39	Kelurahan Utan Panjang	10.183.943.420	10.088.340.309	99,06%
40	Kelurahan Gunung Sahari Selatan	10.800.991.661	10.469.134.647	96,93%
41	Kecamatan Sawah Besar	2.085.441.403	1.953.349.908	93,67%
42	Kelurahan Pasar Baru	11.070.246.400	10.388.874.302	93,85%
43	Kelurahan Karang Anyar	11.662.720.463	11.415.810.759	97,88%
44	Kelurahan Kartini	10.225.191.970	10.036.771.589	98,16%
45	Kelurahan Gunung Sahari Utara	10.166.511.062	9.905.268.376	97,43%
46	Kelurahan Mangga Dua Selatan	11.780.444.870	11.427.525.747	97,00%

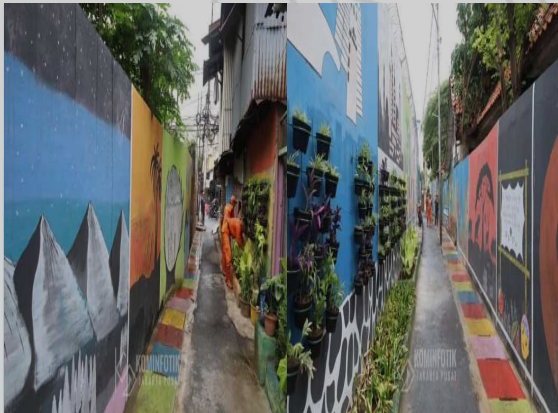


REALISASI APBD TAHUN 2024

NO.	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	TOTAL ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
47	Kecamatan Gambir	1.931.946.187	1.868.250.393	96,70%
48	Kelurahan Cideng	10.880.610.043	10.731.778.698	98,63%
49	Kelurahan Petojo Selatan	9.440.395.970	9.036.675.693	95,72%
50	Kelurahan Gambir	9.509.640.419	9.223.048.529	96,99%
51	Kelurahan Kebon Kelapa	7.379.115.736	7.071.186.228	95,83%
52	Kelurahan Petojo Utara	10.040.540.357	9.772.030.530	97,33%
53	Kelurahan Duri Pulo	9.032.968.120	8.640.316.983	95,65%
	Total	779.977.900.621	746.367.815.588	95,69%



HASIL-HASIL PEMBANGUNAN SEKTOR PENATAAN KAWASAN DAN PELAYANAN PUBLIK



Terlaksananya Sub Kegiatan Penataan Kawasan dan peningkatan Partisipasi Masyarakat

Terlaksananya Sub Kegiatan Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi

Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

MENGACU KEPADA BAB III.3 LKPJ



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	<p>Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menerima kewajiban SIPPT/IPPR dengan total jumlah Berita Acara Serah Terima (BAST) sebanyak 84 BAST dengan nilai total Rp23,91 Triliun. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>a. Masih terdapat aset-aset dari kewajiban pengembang yang ditunda penyerahan karena aset-aset tersebut dimanfaatkan dan disewakan oleh oknum-oknum yang bermain dengan pengembang sehingga dapat merugikan Pemerintah dan Masyarakat.</p> <p>b. Terhadap kewajiban Fasos Fasum dari pengembang pemegang IPPR yang ditelantarkan dan dimanfaatkan publik, namun belum diserahkan sehingga tidak dapat dilakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah, saat ini memang telah ada kerangka regulasi untuk pengambilalihan fasos fasum terlantar oleh Walikota/Bupati melalui Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman, namun dalam implementasinya terdapat berbagai kendala sehingga Pemprov belum dapat melakukan pemeliharaan terhadap aset fasos fasum tersebut, DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta dilakukan inventarisasi daftar permasalahan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Peraturan Gubernur terkait.</p>	<p>a. Kota Jakarta Pusat, terdapat 1 pengembang yang memiliki kasus lahan ber-SIPPT disewakan ketika lahan masih kosong dan belum menyerahkan kewajiban. Pengembang ybs keberatan untuk menyerahkan karena belum memanfaatkan lahan sesuai peruntukan yang dimohon di dalam SIPPT. TL yang telah diupayakan adalah rapat koordinasi dengan pengembang ybs dan permohonan kajian ke Dinas CKTRP mengingat lahan belum dikelola sebagaimana yang dimohonkan di dalam SIPPT.</p> <p>b. Jakarta Pusat telah dilakukan BAST dengan mekanisme Pergub Nomor 97 Tahun 2021 terhadap 2 pengembang apartemen. Selain itu, terdapat 2 SIPPT yang pengelolaan lahannya berupa kompleks rukan dan ruko yang keberadaan pemilikinya tidak lagi diketahui, terhadap 2 SIPPT ini telah diusulkan ke Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup agar di dalam Revisi Pergub nantinya dapat dimasukkan di dalam kriteria pengembang yang dapat ditarik kewajibannya menggunakan mekanisme sebagaimana Pergub 97 Tahun 2021.</p>	<p>a. Mengupayakan jalan tengah agar pengembang bersedia memenuhi kewajiban penyerahan fasos fasumnya.</p> <p>b. Penyesuaian kriteria yang dapat dilakukan penarikan kewajiban menggunakan mekanisme sebagaimana Pergub 97 Tahun 2021, karena SIPPT yang ditelantarkan oleh pengembang tidak hanya berupa perumahan/apartemen.</p>

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

MENGACU KEPADA BAB III.3 LKPJ



NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
2	Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi warga Masyarakat. DPRD Provinsi DKI Jakarta, merekomendasikan kepada para Walikota/Bupati untuk mewajibkan penempatan rumah dinas bagi pejabat Lurah dan Camat dan mengenakan sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja dan pencopotan dari jabatan.	Dibuat Surat Walikota Nomor 172/-076.4 Tanggal 11 Januari 2024 tentang Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Rumah Dinas kepada para Camat dan Lurah yang memiliki rumah dinas dengan hasil Bagi Camat/Lurah yang mendapat rumah dinas dengan kondisi layak huni membuat surat pernyataan untuk menempati	Rumah dinas dengan kondisi layak huni wajib ditempati.



TERIMA KASIH

